

ETNOREFLIKA

VOLUME 4

No. 2. Juni 2015.

Halaman 887-899

**BUDAYA PENDIDIKAN ISLAM DI KESULTANAN BUTON
PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN
MUHAMMAD IDRUS KAIMUDDIN (ABAD KE -19)¹***La Ode Muhammad Syhartijan*²*La Ode Jumaidin*³**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan pendidikan Islam di Kesultanan Buton selama masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung penerimaan masyarakat terhadap penerapan ajaran Islam di Kesultanan Buton selama masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumentasi melalui naskah-naskah dan studi kepustakaan serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) jaringan pendidikan Islam di Kesultanan Buton pada abad ke-19 telah menerapkan sebuah sistem pendidikan yang mengintegrasikan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang berbasis Tasawuf. Sistem pendidikan ini telah mampu memberikan kemampuan bagi Kesultanan untuk membangun sistim politik, pemerintahan dan keamanan. Pendidikan Islam pada masa Kesultanan masih tampak dengan jelas implementasinya yakni pada sikap keberagaman masyarakat Buton yang mampu mengintegrasikan antara nilai-nilai luhur lokal dengan nilai-nilai luhur Al-Qur'an yang bersifat universal; 2) proses pembelajaran yang dimulai dari Ibu Kota Kesultanan (istana) kemudian menyebar ke *kadie-kadie* dan seterusnya ke wilayah *barata*, yang merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki struktur pemerintahan dan masyarakat sendiri, memakan waktu yang panjang dan proses penyebarannya cukup lama.

Kata Kunci: budaya pendidikan, Islam, Kesultanan, Buton

ABSTRACT

This study aimed to analyze the network of Islamic education in the Sultanate of Buton during the reign of Sultan Muhammad K. Kaimuddin. In addition, this study was also aimed to determine the factors that support public acceptance of the teachings application of Islam in the Sultanate of Buton during the reign of Sultan Muhammad K. Kaimuddin. The method used in this study was the historical method with a qualitative approach. Data collections techniques used were interviews, the study documentation through texts, literature study and observation. The results showed that: 1) a network of Islamic education in the Sultanate of Buton on 19th century had implemented an education system that integrates the local culture with the values of the Qur'an based Sufism. The education system had been able to provide the ability for the Sultanate to build a political system, governance and security. Islamic education during the Sultanate still clearly visible on the implementation of the attitudes diversity of Buton society capable in integrating the noble values of local with the noble values of the Qur'an that are universal; 2) learning process that starts from the capital city of the Sultanate (the palace) and then spread to Kadie-Kadie onwards to barata region, which was a small kingdoms that had a structure of government and the community itself, take a long time and the process of distribution was quite long.

Keywords: cultural education, Islam, Sultanate, Buton

¹Hasil Penelitian

²Staf Pendidik pada pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: syhartijan01@outlook.com

³ Staf Pendidik pada pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: ldjumaidin@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap ajaran Islam yang ada pada masa awal sangat berbeda dengan pemahaman terhadap ajaran Islam kemudian, yang telah mengalami pergumulan dengan berbagai budaya dan isme-isme lain yang ditemui di wilayah baru. Artinya bahwa paham keagamaan yang dimiliki umat Islam di suatu negara atau daerah dengan pemahaman keislaman yang ada di pusat penyebaran pertama, jauh berbeda. Persepsi ini telah mengalami proses diferensiasi dan akulturasi. Tapi tampaknya ini hanya sebuah teori yang hanya bisa dilihat dari aspek teoritis belaka. Dalam Kenyataannya, dapat dilihat sendiri bahwa kondisi seperti ini juga terjadi di pusat penyebaran Islam seperti dunia Arab, Makkah dan Madinah.

Kesultanan Buton sebagai sebuah negara pernah eksis selama kurun waktu tujuh abad, diprediksi Islam telah masuk di Buton pada abad ke-16 M. Hal ini dapat dibagi atas dua periode. *Pertama*, Periode kerajaan yang dimulai semenjak pembentukan delapan *bonto* sebagai cikal bakal berdirinya sebuah Kesultanan Buton. *Kedua*, periode kesultanan yaitu terbentuknya konstitusi martabat tujuh dan sifat dua puluh kesultanan Buton yaitu pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin (Sultan IV) yaitu menyempurnakan ketatanegaraan dan menjadikan Kesultanan Buton sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi tertulis. Periode kesultanan tersebut dapat bertahan kurang lebih 4(empat) abad lamanya, dengan 38 perodesasi kepemimpinan kesultanan. Kedua periode tersebut bukan merupakan sesuatu yang terpisah, akan tetapi merupakan suatu proses penyempurnaan yang diibaratkan proses kejadian manusia dari alam roh ke alam nyata sebagai diri manusia yang sempurna sebagai mana Firman Allah dalam Alquran Surat Az Zumar ayat 6 yang artinya : “Dia menjadikan kamu di dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan“.

Masyarakat Islam Arab yang merupakan pelopor dalam perkembangan Islam, juga terlena dengan kondisi seperti ini. Kehidupan mereka telah diwarnai dengan berbagai perbuatan bid'ah dan kufarat, serta hal-hal kemusyrikan lainnya yang dianggap telah menyimpang dari garis dan ketentuan ajaran murni.

Kehidupan duniawi yang dinamis beserta pengabdian rohani, seperti yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi Muhammad Sallallahu Allaihi Wassalam, dan para sahabat-sahabatnya pada akhir abad pertengahan tersebut telah digantikan dengan pesimisme spritualisme yang negatif dari para sufi yang terlalu menekankan segalanya dalam aspek spiritual dan keakhiratan, tanpa banyak mempertimbangkan apakah hal itu layak bila diaplikasikan dalam pola pikir dan kehidupan masyarakat Islam awam. Tampaknya tradisi pemahaman ini juga melanda dunia Arab.

Negara Arabia yang merupakan tempat agama Islam lahir, jatuh merana ke dalam kondisi yang terabaikan sejak jatuhnya kerajaan Abbasiyah. Orang-orang Arab kembali kepada tradisi lama mereka. Pergolakan antar etnis sudah menjadi pemandangan biasa. Hal ini berakibat negatif bagi kesatuan dan persatuan ummat, dan otomatis melemahkan sendi-sendi keislaman mereka.

Para sejarawan menyebutkan bahwa Islamisasi Nusantara dimulai dari kawasan pesisir Sumatra Utara (Melayu) dengan lahirnya kerajaan Islam Perlak. Terus berlanjut ke kawasan timur, Jawa, Madura, Bali, dan Mataram (Hamid, 1996). Gerakan Islamisasi Melayu dan Jawa ternyata tidaklah terputus dengan gerakan islamisasi diluar jawa, seperti dikawasan Indonesia timur (Soeratno, 2003, Baried, 1989, Al; - Attas, 1972).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis budaya pendidikan islam yang diterapkan di kesul-

tanan Buton pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin; 2) untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap penerapan pendidikan Islam di Kesultanan Buton pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur, dimana Penulis mencari referensi-referensi dan naskah-naskah, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kebudayaan masyarakat Buton pada Abad Ke-19. Selain itu, juga dilakukan interview (wawancara) terhadap tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh sejarah yang mengetahui seluk-beluk sistem sosial masyarakat Buton.

C. BUDAYA PENDIDIKAN ISLAM DI KESULTANAN BUTON PADA ABAD KE - 19

1. Pendidikan

a. Istana

Pada periode Kesultanan Buton, istana menjadi pusat pengkajian agama Islam. Pendidikannya diatur oleh Sultan, artinya sudah diatur oleh pemerintah, dalam bentuk aturan tertulis berdasarkan ajaran Islam. Pendidikan di istana memiliki ciri khas yakni hanya diperuntukkan golongan *kaomu* dan *walaka* saja, maka materi yang diajarkan dominan berbasis tasawuf yang bersentuhan dengan Martabat Tujuh dan ditangani langsung oleh Sultan dan Syekh Sumbal Al-Mulki dari Mekkah (Yunus, 2005).

Dalam naskah *Jauhara Manikam* menyebutkan bahwa *kai rangoaku iguruku mancuana* (dan aku dengar dari guruku yang mulia) *mianna Makkah Muhammad siytu* (orang mekkah Muhammad itu). Allaihi Rahmatullah (semoga dirahmati oleh Allah). Muhammad yang dimaksud disini adalah Muhammad bin Syais Sumbal Al -Makki.

Dalam wawancara dengan La Niampe tanggal 4 April 2012 menjelaskan bahwa, istana sultan merupakan tempat pembelajaran para peserta didik yang pesertanya dari golongan *kaomu* dan *walaka*. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Yunus (1995), bahwa golongan *kaomu* dan *walaka* memiliki keistimewaan dalam mempelajari ilmu agama di istana terutama yang berhubungan dengan ilmu tasawuf. Hal ini mencerminkan bahwa sangat sakralnya istana disebabkan dari istana inilah akan melahirkan pemimpin-pemimpin spiritual di bidang agama.

Intensitas pembelajaran di bidang agama di era itu cukup tinggi, karena sejak periodisasi kepemimpinan Muhammad Idrus Kaimuddin paradigma sistem pemerintahan telah melahirkan fondasi yang sangat kuat bagi masyarakat Buton berupa tertanamnya nilai-nilai substansi agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui penerapan syariah islam dijalankan dengan sungguh-sungguh yang diimplementasikan melalui undang-undang negara kesultanan *Martabat Tujuh*. Ketaatan terhadap sultan dengan sebutan *oputa mokobaadhiana*, telah ditamzikan sebagai dewa atau wakil tuhan di muka bumi. Menurut Yunus sebutan-sebutan yang lazim diberikan Sultan seperti, *Oputa*, keramat, insan kamil menandakan bahwa Sultan memiliki karisma dimata rakyatnya. Karisma dalam pandangan Yunus hanya bisa didapatkan melalui pendekatan sufistik yang banyak ditemui melalui model pembelajaran di istana yang kebanyakan diwariskan oleh golongan *kaomu* dan *walaka*.

Pendidikan formal di istana kesultanan dilihat dari segi tujuannya adalah, pertama mencetak calon-calon ulama atau ahli agama. Kedua mencetak calon-calon pemimpin yang kelak memiliki kemampuan yang memadai sebagai calon-calon kepala negara atau Sultan serta jabatan penting lainnya seperti Sapati, Kenepulu, Kapita Lao/Kapita Raja. Sasaran yang ketiga ada-

lah untuk mencetak calon-calon permaisuri Sultan. Oleh karena itu, gadis-gadis dari keluarga kesultanan mendapatkan pendidikan khusus untuk mempersiapkan mereka agar memiliki kompetensi yang memadai sebagai calon permaisuri Sultan. Mereka dibekali dengan kekuatan-kekuatan spiritual yang mendalam kesabaran dan ketabahan. Sebab menurut tradisi yang dipegang oleh pemerintah Kesultanan ketika itu, adalah bahwa kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh permaisuri sultan (Alhadza dkk, 2009). Sehingga, para anak gadis tersebut selain dibekali dengan pendidikan tentang keterampilan membina keluarga sakinah dalam rumah tangga Sultan, juga mendapatkan pendidikan khusus sebagai calon permaisuri Sultan sebagai pemegang kunci kesejahteraan, keamanan serta kemajuan kehidupan bermasyarakat pada periode itu. Metode yang digunakan adalah diskusi, Tanya jawab kritis, hafalan dan ceramah.

b. *Zawiyah*

Fungsi dari balai pendidikan *Zawiyah* menurut Hafid (2009) yakni:

1. *Zawiyah* berfungsi untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dalam wilayah kesultanan.
2. Komponen pendidikan *Zawiyah* terdiri siswa, tenaga pengajar, materi pengajaran dan metode.
3. Pengajar dibalai pendidikan *Zawiyah* adalah Sultan. Upah atau gaji dari pemerintah ataupun dari masyarakat tidak ada. Jadi guru mengajar tanpa imbalan. Tampaknya langsung atau tidak langsung dalam hal ini, ada pengaruh konsep pendidikan dari imam Al-Gazali yang berpendapat bahwa guru itu hendaknya secara tulus dan ikhlas mengajarkan ilmunya tanpa mengharapkan upah. Sistem pembelajaran seperti ini menunjukkan pula betapa kuatnya tradisi sufistik yang berlaku pada system pendidikan ketika sang guru tidak mengharapkan apa-apa dari siapapun dari kegiatan mendidiknya itu. Ia semata-

mata hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT. Pola hidup yang ditempah oleh seorang sufi warisan tradisi zaman klasik Islam yang sangat kental pada masa kesultanan Buton khususnya dikalangan ulamanya.

Pada periode kesultanan, di pusat pemerintahan kesultanan ada dua lembaga pendidikan Islam *Zawiyah*, yaitu pertama berlokasi di Badia, tidak jauh dari masjid Badia. Kedua yang berlokasi di dekat istana Sultan. Peserta didik yang belajar pada *Zawiyah* ini tidak terbatas pada anak-anak saja tetapi juga orang tua. Untuk anak-anak nateri yang diajarkan selain mengaji dan dasar-dasar agama yang terutama adalah tentang ahlak. Bagi orang dewasa selain tauhid, fiqih, tasawuf, juga adalah adat yang berlaku di Kesultanan (Alhadza dkk, 2009).

Hasil wawancara dengan Hasim Kudus, tanggal 16 Maret 2012 mengatakan bahwa, metode mengajar menggunakan metode ceramah, hafalan, tanya-jawab, demonstrasi, pengulangan dengan sistem *khalakah* berlangsung di balai pendidikan *Zawiyah* dan pengajarannya disesuaikan dengan kondisi murid. Antara murid – murid anak-anak dan dewasa kegiatan belajarnya dipisah (tidak bersamaan), sehingga metodenya disesuaikan antara bahan ajar dengan tingkat kemampuan murid untuk menerima materi pelajaran tersebut. Khusus bagi Sultan dan keluarganya tidak belajar pada *Zawiyah* akan tetapi mereka belajar di istana. Jadi pendidikan di *Zawiyah* ini muridnya adalah kalangan masyarakat di luar keluarga Istana Sultan. Untuk metode pengulangan sebagai contoh yang digunakan pada pelajaran membaca Al-quran dan pelajaran-pelajaran dasar agama Islam misalnya shalat. Metode ceramah meluas kepada ajaran-ajaran kemasyarakatan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, seperti menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma kehidupan kemasyarakatan. Metode diskusi lebih bersifat pendalaman, menguji dan mengembangkan ilmu-ilmu

keagamaan yang dasar keilmuannya telah dimiliki sebelumnya.

Di *Zawiyah*, bagi murid-murid yang baru datang menuntut ilmu serta belum mempunyai dasar keilmuan keagamaan seperti membaca Al-quran maka materi yang diberikan adalah pelajaran membaca Al-quran yang sebelum memulai kegiatan pelajaran maka murid-murid ditekankan terlebih dahulu tentang pentingnya mensucikan diri sebelum memegang Al-quran. Dalam menerapkan metode menghafal, sang guru menggunakan berbagai pendekatan salah satunya adalah dengan memberikan perbandingan metafora huruf-huruf Al-quran seperti huruf Alif dipersamakan dengan huruf tegak lurus.

c. Perpustakaan.

Perpustakaan dibangun pada periode pemerintahan Sultan La Jampi yang bergelar Qaim Addimn yaitu Sultan ke-25 dan masih digunakan pada masa pemerintahan Muhammad Idrus Kaimuddin. Perpustakaan ini terletak di dekat masjid Badia. Perpustakaan sebagai tempat menyimpan koleksi berbagai kitab, berfungsi sebagai lembaga pendidikan pada periode itu, sebab para pengunjungnya adalah untuk menuntut ilmu yang diminati, juga dimungkinkan adanya diskusi dikalangan mereka untuk saling tukar informasi tentang hasil-hasil bacaan. Dalam keadaan seperti itu terjadi proses pembelajaran yang efektif antara guru dan murid sebab diskusi yang dilaksanakan itu akan dapat mempertajam pemahaman terhadap apa yang baru saja dibaca atau apa yang mereka pernah baca diperpustakaan.

Fenomena tentang adanya perpustakaan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan Islam yang berlangsung telah berkemabang tahap demi tahap. Berbarengan dengan itu secara kelembagaan juga berkembang terus sampai memasuki akhir abad ke-20.

Pada periode kesultanan, lembaga pendidikan di istana kesultanan kalau tidak bisa dikatakan berbentuk pendidikan formal maka minimal sudah dapat dikatakan bercorak formal. Pendidikan Islam yang diselenggarakan di istana adalah diatur oleh Sultan, artinya sudah diatur oleh pemerintah. Meskipun pada awalnya bukan dalam bentuk aturan tertulis berdasarkan ajaran Islam. Namun setelah lahirnya Undang-undang martabat tujuh, maka sudah mulai ada aturan tertulis berdasarkan tasawuf. Oleh karena itu, sultan sebagai pemerintah, maka segala kebijakannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, tentunya mengacu kepada undang-undang tersebut, termasuk penyelenggaraan pendidikan di istana yang langsung ditangani oleh sultan. Pola pendidikan formal di istana kesultanan pada periode kemajuan pendidikan Islam dilihat dari segi tujuannya, antara lain:

- a. Mencetak calon-calon ulama atau ahli agama. Sebagai contoh Sultan Muhammad Aidrus Qaimuddin sendiri yang bergelar *Qa'im ad-Din I* sebagai Sultan XXIX yang berkuasa di abad 19, selain ia seorang Sultan, juga sekaligus sebagai ulama dan pujangga yang banyak karya intelektualnya. Ia sejumlah tulisan yang berisi ajaran Islam, empat diantaranya dapat dikategorikan sebagai ajaran tasawuf. Keempat tulisannya itu adalah :

- 1) *Jauharana Manikamu.*
- 2) *Mu 'nisah al-Qulub fi az-Zikr wa-Musya'hadah alam al-Guyub.*
- 3) *Diya' al-Anwar fi Tasfiyah al-Akdar.*
- 4) *Kasyf al-hijab fi Muraqabah al-Wahhab.*

Dari keempat tulisannya, kita dapat memahami corak pemahaman dan pengalaman tasawufnya, yang merupakan corak ajaran tasawuf berpengaruh di negerinya pada abad ke-19.

- b. Mencetak calon-calon pemimpin yang kelak memiliki kemampuan yang memadai sebagai calon-calon kepala Nega-

ra atau Sultan serta jabatan penting lainnya seperti Sapati, Kenepulu, Kapita Lao/Kapita Raja, dan sebagainya.

Dalam esensi kepemimpinan di Kesultanan Buton, cara-cara kepemimpinan yang dilakukan pemimpin di wilayah Buton dalam mengelola pemerintahan agar tetap eksis dan bertahan serta tidak mengalami guncangan yang serius, yaitu dengan menerapkan pola kepemimpinan “*Bhinci-Bhinciki Kuli*” (Turi, 2007). Secara harfiah, kalimat tersebut mengandung makna: cubitlah kulit sendiri, jika terasa sakit, maka demikian pula jika kita hendak mencubit kulit orang lain.

Turi (2007) lebih mendalam mengembangkan konsep “*Bhinci-Bhinciki Kuli*” yang bersumber dari *sara pataanguna* yang terdiri sara *pataanguna* tahap pertama dan *sara patanguna* tahap kedua. *Sara pataanguna* tahap pertama, terdiri dari: (a) *pomae-maeka* (saling menghormati); (b) *popia-piara* (saling memelihara atau saling mengabdikan); (c) *pomaa-maasiaka* (saling mencintai); (d) *poangka-angkataaka* (saling menghargai, serta utama mengutamakan). Sedangkan yang dinyatakan sebagai *sara pataanguna* tahap kedua yaitu: (a) *yinda-yindamo arataa somanamo karo* (biar tidak memiliki harta asalkan diri selamat); (b) *yinda-yindamo karo somanamo lipu* (rela mengorbankan diri demi kepentingan bangsa dan negara); (c) *yinda-yindamo lipu somanamo sara* (biarkan negeri terancam asalkan aturan tetap ditegakkan dan pemerintahan tetap selamat); (d) *yinda-yindamo sara somanamo agama* (biarkan pemerintahan terancam asalkan agama tetap abadi). Konsep ini secara internal telah dimulai sejak berdirinya kerajaan Buton sampai pada dimasa kesultanan Buton 1960-an.

- c. Mencetak calon-calon permaisuri Sultan.

Kurikulum pendidikan kepemimpinan adalah menonjolkan kompetensi spiritual yang berbasis tasawuf, kemudian dilanjutkan dengan kompetensi sosial yang berbasis pada jiwa persatuan. Kompetensi ini tampak dalam falsafah hidup kesultanan “*pobinci-binciki kuli*” yang berarti bahwa semua manusia mempunyai perasaan yang sama, harga diri yang sama dan hak asasi yang sama. Konsep ini dijabarkan dalam makna sebagai berikut:

- a. *Pomae-maeka* (saling menghargai antara sesama anggota masyarakat). Hal ini berarti bahwa seluruh anggota masyarakat harus saling takut satu dengan lainnya. Yang muda takut kepada yang tua dan yang kuat takut, takut pula sama yang lemah. Rasa takut yang bersifat timbal balik ini menunjukkan bahwa setiap orang diakui hak-hak dasarnya, harga diri, kehormatan, perasaan, harta benda dan keluarga dan lain-lain yang wajib dipelihara, dipertahankan dan dilindungi sehingga tercipta suasana aman dan damai. Untuk itu setiap anggota masyarakat wajib merasa takut untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain.
- b. *Pomaa-maasiaka* (saling menyayangi antar sesama anggota masyarakat). Artinya bahwa antara sesama anggota masyarakat harus saling sayang menyayangi secara timbal balik. Orang tua harus menyayangi yang muda dan yang muda harus pula menyayangi yang tua, demikian pula yang terjadi antara yang kaya dan yang miskin, antara yang kuat dan yang lemah. Dengan demikian akan tercipta perilaku tolong menolong dan gotong royong dalam hidup mereka.
- c. *Popia-piara* (saling memelihara antar sesama anggota masyarakat). Hal ini berarti bahwa antara anggota masyarakat berkewajiban saling memelihara, saling melindungi baik moral maupun materiil termasuk kedudukan seseorang dalam masyarakat.

- d. *Poangka-angkataka* (saling mengangkat derajat antara sesama anggota masyarakat). Hal ini bermakna bahwa setiap anggota masyarakat yang tekah memberikan darma baktinya bagi masyarakat umum atau suka mendermakan harta kekayaannya bagi kepentingan umum, wajiblah diberikan penghargaan yang sesuai dengan darma baktinya tersebut.

Dengan adanya falsafah tersebut maka dikemaslah dalam bahasa menggugah jiwa dan semangat untuk berjuang dan berkorban sebagai berikut:

- a. *Bolimo arata somanamo Karo* (janganlah harta yang penting diri).
- b. *Bolimo Karo somanamo Lipu* (janganlah diri, yang penting negeri).
- c. *Bolimo Lipu somamanamo Sara* (janganlah negeri yang penting pemerintah).
- d. *Bolimo Sara somanamo Agama* (janganlah pemerintah yang penting agama)

Keempat hal tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- a. *Bolimo arataa somanamo karo*, maksudnya mendahulukan kepentingan diri dari pada harta. Semua harta baik pemilikan perorangan, kelompok maupun milik negara wajib dijaga. Namun demikian, harta tersebut dapat saja dikorbankan demi untuk melindungi hal yang lebih penting, yaitu *karo* atau diri manusia, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Contoh pada saat pembangunan benteng keraton rakyat diminta mengorbankan hartanya untuk keperluan pembangunan benteng tersebut.
- b. *Bolimo Karo Somanamo Lipu*, berarti bahwa setiap orang siap untuk mengorbankan dirinya demi untuk mempertahankan negara. Di sini berarti pula kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Setiap orang wajib mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadinya. Contohnya setiap or-

ang harus berperang bila musuh telah mengancam Negara.

- c. *Bolimo Lipu somanamo sara*, maksudnya bila musuh terlalu kuat, dapat saja bala tentara mundur dan wilayah-wilayah kesultanan dikuasai musuh, tetapi yang terpenting pemerintah harus tetap ada dan dipertahankan. Karena dengan tetap adanya pemerintahan berarti kemungkinan untuk menyusun kekuatan dan menyerang kembali lawan agar dapat memperoleh kemenangan, masih tetap ada peluang.
- d. *Bolimo Sara somanamo Agama*, maksudnya kalau pemerintahan tidak bisa lagi dipertahankan, bolehlah dikorbankan yang penting keyakinan kita pada agama dalam hal ini agama islam haruslah tetap sampai akhir hayat. Falsafah ini secara lebih konkret tertuang dalam ungkapan berikut "lahir bersama iman, beramal dengan iman dan mati dengan iman". Hal ini telah membawa implikasi pada kriteria persyaratan untuk menduduki jabatan Sultan, yaitu:

- 1) Bersifat "Sidik" yaitu berkata benar dan jujur dalam segala hal, rela menjalankan kebenaran dan tidak boleh berbohong.
- 2) Bersifat "tabligh" yaitu menyampaikan segala perkataan yang memberi manfaat terhadap kepentingan umum, tidak boleh menyembunyikan sesuatu maksud.
- 3) Bersifat "amanah" yaitu mempunyai rasa kepercayaan terhadap umum, tidak boleh mempertukarkan sesuatu hal sehingga pendengar tidak sesuai dengan batin dan perasaan.
- 4) Bersifat "fatolah" yaitu fasih lidah dalam berbicara artinya ia tidak boleh kaku dalam berbicara (wawancara dengan La Niampe, 4 April 2012).

Dalam kondisi masyarakat sebagaimana yang digambarkan di atas, berlangsung proses pendidikan Islam didalam kesultanan Buton pada era itu. Gambaran

tersebut dapat memperjelas jalannya proses pendidikan Islam serta implikasinya pada masyarakat Buton itu sendiri. Dengan mantapnya penanaman nilai-nilai Islam melalui proses pendidikan akan berimplikasi pada semakin stabil dan semakin majunya kondisi pemerintahan, berimplikasi pada semakin majunya sistem pendidikan Islam.

Dalam perkembangan Pendidikan Islam di Kesultanan Buton pada periode Sultan Qaimuddin Muhammad Aydrus, Sultan XXIX mencapai puncak kemajuan yang cukup pesat. Pada periode ini, pendidikan Islam di Kesultanan Buton sudah agak mapan, sehingga berimplikasi pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan agama bagi Sultan dan para pejabat kesultanan (Wawancara dengan La Niampe, 21 Maret 2012).

Bahkan pada periode puncak kemajuannya, Sultan juga sudah menjadi ulama atau ahli agama, yang ditunjukkan oleh karya intelektualnya berupa buku yang ditulis, seperti buku *jauhara manikam*, *Mu'nisah Al-Qulub*, *Fi az-Zikr wa-musyadah*, *alam al-guyub*, *Diya Al-Anwar Fi Tasfiah al-Akdar*, *Fi-Mura-Aqabah al-wakhab*, baik dibidang agama maupun dibidang lainnya. Perkembangan pendidikan tersebut, Mulai dari metode pembelajaran yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan peserta didik juga materi-materinya yang lebih meluas, bukan hanya membahas materi keagamaan namun juga membahas materi-materi pendidikan umum seperti pemerintahan. Proses pendidikan pun tidak hanya dilakukan di istana Sultan saja, namun sudah diterapkan untuk masyarakat umum, melalui balai-balai pendidikan seperti *zawiyah* dan masjid atau langgar.

Zawiyah adalah lembaga pendidikan khusus bagi orang yang ingin memperdalam pengetahuan agama, khususnya tasawuf. Lembaga pendidikan ini disediakan bagi warga masyarakat umum. Sedangkan Sultan beserta keluarganya diajar oleh seorang Ulama dari Mekkah bernama Syekh

Muhammad Ibn Syais Sumbul Al-Maki dan seluruh pejabat kesultanan mendapatkan pendidikan didalam istana kesultanan (Ali-fuddin, wawancara, 3 April 2012).

Tenaga pengajar pada saat itu seorang ulama dari Mekkah bernama Syekh Muhammad Ibn Syais Sumbul Al-Makki, sebagaimana yang tertulis dalam *Sarana Wolio*. Dalam dokumen itu tertulis: *kai rangoku iguruku mancuana* (dan aku dengar dari guruku yang mulia) *miana Makkah Muhammad Siyru* (Orang Mekkah Muhammad itu), *Allaihi Rahmatullah* (semoga dirahmati oleh Allah).

Muhammad yang dimaksud disini adalah Muhammad bin Syais. Hal ini dipahami dari tulisannya yang lain mengatakan; Lalu aku menuliskanya sebagaimana yang diajarkan kepadaku dan diizinkan aku untuk mengajarkanya oleh Syehku dan guruku Asy-Syekh Muhammad Ibn Syais Sumbul Al-Makki.

Dalam proses pembelajaran, khususnya yang berkenaan dengan ilmu tasawuf terdapat perbedaan, yakni: antara hal yang boleh diajarkan khusus untuk keluarga istana dan hal yang tidak boleh diajarkan untuk masyarakat umum. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat Buton yang diberlakukan sejak zaman kesultanan yaitu: *kaomu*, *walaka* dan *papara*. Oleh karena itu, materi pendidikan di istana kesultanan Buton bersifat formal, sehingga alumni dari sekolah ini dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di kesultanan, seperti: jabatan Sultan, *sapati* maupun *kenepulu*. Mereka berasal dari golongan *kaomu* dan *walaka*, yang umumnya mendiami keraton dan *baadia*. Hal ini menyebabkan adanya pertimbangan politis agar jabatan Sultan, sejak Dayanu Iksanuddin (La Elangi) Sultan ke-IV sampai pada masa Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin ke XXIX di awal abad 19, tetap dijabat dari golongan *kaomu tanalandu* dari garis keturunan La Elangi (Dayanu Iksanuddin), golongan *kaomu tapi-tapi* dari garis ketu-

runan *sapati* La Singgah, dan dari golongan *kaomu kombewaha* dari garis keturunan *kenepulu* La Bula. Meski demikian, proses pengangkatannya tetap melalui pemilihan.

Dalam perkembangan selanjutnya, tenaga pendidikpun mulai berdatangan. Ada pula yang datang karena khusus diundang oleh Sultan. Pada masa pemerintah Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin, telah datang seorang ulama sekaligus sebagai guru spiritual sultan bernama Syekh Muhammad bin Syaib Sumbul al-Makki. Beliaulah yang membantu Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin dalam memberikan pengajaran di istana kesultanan, masjid serta *zaawiyah*. Selain itu, dengan diterbitkannya undang-undang *martabat tujuh*, menggambarkan semakin kuatnya pemahaman akan nilai-nilai Islam. Undang-undang tersebut yang terdiri dari 12 Bab dan Bab I tentang materi pendidikan. Di dalam Bab I dan pasal 1 UU Martabat Tujuh, terdapat konsep yang berhubungan dengan pendidikan yaitu, *Binci-Binci Kuli*. Untuk menjamin dasar falsafah tersebut, maka dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimanifestasikan ke dalam empat pemahaman dasar yaitu:

1. *Pomae-maeka* artinya saling takut melanggar rasa kemanusiaan antara sesama anggota masyarakat.
2. *Pomaa-maasiaka* artinya, saling menyayangi antara sesama anggota masyarakat.
3. *Popia-piara* artinya saling memelihara antara sesama anggota masyarakat

Poangka-angkataka artinya saling mengangkat derajat antara sesama anggota masyarakat, terutama yang telah berjasa kepada negara. Dengan undang-undang tersebut yang merupakan implementasi dari syari'ah Islam, maka secara otomatis akan mengarahkan segala segi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa pada masyarakat kesultanan Buton kepada nilai-nilai ajaran Islam yang dipadukan dengan adat istiadat masyarakat, sehingga dapat mendukung ter-

jadinya proses perkembangan pendidikan Islam yang lebih dinamis. Undang-undang *martabat tujuh* dapat dikatakan juga sebagai pedoman yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan agama Islam terutama yang menyangkut, syariat Islam.

Perkembangan pendidikan Islam tampak juga dengan lahirnya *huri wolio* (tulisan Buton), yang merupakan karya sastra monumental masyarakat Buton ketika itu dengan mengkombinasikan aksara Arab yang disesuaikan dengan pelafalan bahasa wolio (Wawancara dengan La Niampe, 3 April 2012). Dengan lahirnya *huri wolio* tersebut, maka lahirlah sejumlah karya-karya intelektual yang tercetak dalam bentuk buku-buku di periode itu. Puncak pendidikan Islam ini adalah pada periode Sultan XXIX Sultan Qaimuddin Muhammad Aydrus. Pada saat itu, perpustakaan semakin maju dan menjadi gudang ilmu bagi masyarakat serta sebagai pusat studi kajian-kajian ilmiah.

Pada periode itu bidang hukum Islam menjadi relatif lebih modern dimana aplikasinya berdasarkan pada ijtihad, maka hukum waris antara laki-laki dan perempuan sama berdasarkan kondisi lokal di Buton ketika itu (wawancara dengan La Fariki, 6 April 2012).

Dalam perspektif penulis, kemajuan pendidikan Islam dimasa pemerintahan Sultan Idrus Kaimuddin merupakan proses regenerasi intelektual, yang dibentuk berdasarkan teori Braudel pada tingkat peradaban suatu negara. Ia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan di Kesultanan Buton dengan mengadopsi pola pendidikan yang didapatkan dari Sultan La Jampi yang bergelar Sultan Qa'im Addin (XXIV) di abad ke-18.

Kemampuan para Sultan untuk memiliki sifat-sifat luhur yang menjadi cita-cita adat negeri mereka, yaitu memperju-

angka terciptanya ketentraman dalam kehidupan mereka, merupakan salah satu unsur yang menjadikan Sultan memiliki wibawa dimata rakyatnya. Kewibawan atau kharisma didapatkan melalui pendidikan tasawuf. Artinya seorang Sultan yang memimpin adalah dipilih oleh seluruh rakyatnya dan rakyat mengakui bahwa ia punya kapasitas yang merupakan cita-cita orang banyak.

2. Pendidikan Non Formal

a. Masjid.

Masjid merupakan pusat pengkajian Islam dalam memperdalam ilmu-ilmu agama, seperti fiqih, Alquran-hadits, bahasa Arab. Metode yang ditempuh adalah melalui hafalan, diskusi, dan tanya jawab. Peserta dalam proses pembelajaran adalah masyarakat umum, mulai usia kanak-kanak, dewasa hingga orang tua. Masjid Keraton merupakan sentral pendidikan Islam kala itu. Konsentrasi pengajian agama Islam terpusat di Masjid Keraton. Lulusan dari pendidikan ini akan dikirim ke *kadie-kadie* atau *bharata-bharata* untuk menjadi tenaga pelajar. Implikasi dalam bidang pendidikan non-formal ini, maka dibangun masjid-masjid dan langgar di daerah *bharata-bharata* dan *kadie-kadie* tersebut. Pembangunan masjid semakin berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pendidikan di pusat kesultanan. Masjid pada periode kesultanan, selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga memiliki fungsi utama sebagai kegiatan pendidikan. Metode pengajian ditempuh dengan mempelajari baca tulis Al-quran, aqidah ahlak, tauhid, ibadah, muamalat, dan tasawuf serta materi-materi lainnya. Tenaga pengajarnya adalah Muhammad Idrus kaimuddin dan Syeikh Sumbal Al Makki dari Makkah.

3. Pendidikan In Formal

a. Rumah

Rumah merupakan sarana utama tempat berlangsungnya proses pendidikan. Rumah-rumah yang dijadikan sebagai tem-

pat pelaksanaan pendidikan tersebut adalah rumah guru dan pejabat tinggi kesultanan. Rumah menjadi sarana sentral pusat pendidikan Islam, sejalan dengan diwajibkannya oleh sultan untuk pejabat-pejabat di daerah untuk memeluk agama Islam. Rumah-rumah imam, khatib, *moji* serta sebahagian rumah penduduk yang sudah mantap pemahaman dan pengamalan keagamaanya.

Murid-murid yang belajar tempat-tempat tersebut adalah murid-murid yang berada di *kadie-kadie* dan *bharata-bharata* baik di usia anak-anak, dewasa, naupun orang tua. Sementara itu, tenaga pengajarnya adalah pejabat-pejabat kesultanan yang ditunjuk oleh sultan untuk mengajar di *kadie-kadie* yang merupakan wilayah kekuasaan kesultanan. Materi yang diberikan oleh para guru, biasanya hanya sebatas pemahaman pada tingkat keislaman bukan untuk menjadi ulama atau guru. Oleh karena itu, kurikulum yang diajarkan juga masih sederhana. Metode yang digunakan juga sebatas ceramah atau nasehat-nasehat

Keluarga atau rumah tangga dalam Islam merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Tahrim, 66:6 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

Pendidikan Islam pada periode ini, terkait erat dengan proses masuknya Islam di Buton pada periode prakesultanan dan periode awal kesultanan, dimana proses pendidikan Islam yang utama terjadi secara informal. Namun seiring perjalanan dan perkembangannya, pendidikan yang informal tersebut kemudian berkembang dengan munculnya lembaga pendidikan nonformal dan selanjutnya pendidikan bercorak formal yang berciri, sistematis, terstruktur, tertib,

terencana dan bersifat klasikal, seperti pada istana Sultan dan *zawiyah*.

Pendidikan informal inilah yang mulanya terjadi dan berlangsung sebelum terjadinya proses pendidikan non formal yang kemudian berkembang menjadi pendidikan bercorak formal. Pendidikan informal yang terjadi pada dua kelompok lapisan masyarakat, yaitu dikalangan masyarakat lapis bawah dan kelompok masyarakat lapis atas (bangsawan/elit) memiliki materi berbeda. Kedua proses pendidikan informal tersebut sebelumnya terjadi secara terpisah dan tidak terjadi hubungan diantarnya. Hal ini disebabkan oleh karena sistem pendidikan ketika itu sangat erat kaitannya dengan stabilitas politik dan pemerintahan.

Pendidikan informal yang terjadi di kalangan masyarakat lapis bawah sebenarnya sudah berlangsung cukup lama sebelum raja sendiri memeluk Islam. Namun karena proses pendidikannya berlangsung secara pasif dan berlangsung dengan tidak maksimal, maka corak keislaman masyarakat Buton sebelum periode kesultanan kurang nampak. Hal ini berbeda dengan yang terjadi dikalangan masyarakat lapisan atas (bangsawan/elit). Proses pendidikan dilakukan awalnya bersifat informal, namun dengan intensitas dan keseriusan yang tinggi terutama oleh Sultan, maka mulai dilakukan dengan teratur dan terencana sehingga bisa berjalan dengan maksimal. Proses selanjutnya, pada tingkatan masyarakat lapisan atas, kegiatan pendidikan tersebut selanjutnya berubah menjadi bersifat formal.

Lembaga pendidikan Islam di kesultanan Buton pada masa Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin dalam mengajarkan Islam di istana dengan materi dakwah Islam pendidikan Islam adalah para pejabat tinggi pemerintahan kesultanan Buton mulai dari Sultan, *Sapati Kenepulu*, *Kapitalau* dan *Bhonto* serta para *Bobato (lalaki)*. Pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan keagamaan terutama oleh Sultan dan para peinggi istana sudah mapan pada periode

Sultan Idrus Qaimuddin (La Niampe, 2009).

Uraian secara lengkap mengenai Sifat Dua Puluh terungkap dalam teks Sarana Wolio (SW) Muhammad Idrus Kaimuddin untuk dijalankan secara murni dan konsekuen dalam Negara kesultanan Buton.

D. IMPLIKASI PENDIDIKAN ISLAM PADA PERIODE PEMBINAAN DASAR-DASAR PENDIDIKAN ISLAM DI KESULTANAN BUTON

Implikasi yang bercorak politik pada periode ini, tampak pada adanya perintah sultan untuk mewajibkan seluruh masyarakat Buton untuk memeluk agama Islam. Sedangkan implikasi dalam bidang sosial dan budaya belum begitu tampak, karena ajaran Islam baru mulai ditanamkan pada lingkungan terbatas, baik dari segi materi yang diajarkan maupun dari segi jangkauannya terhadap masyarakat luas. Artinya masih terbatas pada tokoh-tokoh masyarakat baik di tingkat pusat, daerah, maupun di desa-desa, sedangkan di tingkat desa hanya diberikan ajaran-ajaran dasar agama dan akhlak dan adat-istiadat.

Implikasi di bidang pendidikan adalah nampak pada mulai tertanamnya substansi ajaran Islam yang berbasis pada tasawuf, terutama dikalangan keluarga kesultanan serta seluruh jajaran pembesar keluarga kesultanan. Implikasi di bidang pendidikan dengan pola semacam inilah yang memuluskan perkembangan berikutnya, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Martabat Tujuh sejak masa kepemimpinan Sultan Dayanu Iksanuddin sampai pada periode Sultan-Sultan di abad ke-19 dan abad ke-20. Martabat tujuh inilah yang menjadi pedoman dalam berperilaku masyarakat Buton karena di samping sebagai undang-undang kesultanan juga dihayati oleh masyarakat Buton sebagai roh spiritual dalam memandang perjalanan hidup manusia didunia sampai perjalanan kealam akhirat. Ka-

rena bersentuhan dengan konsep tasawuf teologis dan tarekat yang mengarah pada perjalanan manusia secara peripurna dalam menciptakan manusia yang insan kamil.

Pada tahap ini faktor yang menarik untuk dicermati yakni implikasi dari sistem pendidikan yang diberlakukan, khususnya dikalangan keluarga istana serta seluruh pembesar-pembesar dan pejabat pada seluruh jajaran dan perangkat pemerintah kesultanan. Sebagaimana diketahui bahwa meskipun Buton sebelum beralih dari status kerajaan menjadi kesultanan, kondisi pemerintahan yang berlaku sudah menetapkan system demokrasi. Sistem ini masih berlanjut setelah kerajaan Buton menjadi Kesultanan. Dalam sistem demokrasi tersebut, pemberlakuan suatu undang-undang adalah membutuhkan persetujuan rakyat melalui wakil-wakil. Tradisi pemerintahan yang dikenal pada periode itu, sudah tampak adanya lembaga eksekutif yakni sultan dan seluruh perangkat dan pejabat dalam jajarannya seperti Sapati, Kenepulu, Kapita Lao/-Kapita Raja. Sementara itu ada pula lembaga yang dikenal dengan istilah “*Siolimbona*” yang fungsinya menjalankan fungsi legislatif.

Dalam pemberlakuan Undang-Undang *Martabat Tujuh*, ketika Sultan mengajukan kepada lembaga tersebut, maka lembaga tersebut dapat menyetujuinya disebabkan mereka telah memahami dengan baik substansi ajaran Islam yang berbasis spiritual dan moral sebagaimana yang tercermin dalam undang-undang martabat tujuh. Pemahaman tersebut terjadi disebabkan antara lain oleh faktor adanya transmisi nilai-nilai Islam melalui proses pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Sultan di Istana kesultanan maupun oleh masyarakat dibawah ke peloporan murid murid Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin yang sudah mampu memahami substansi nilai-nilai Islam yang diajarkan Sultan melalui pendekatan tasawuf.

E. PENUTUP

Pendidikan Islam di Kesultanan Buton pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin telah dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan formal telah meletakkan Istana sebagai pusat pendidikan untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang berasal dari golongan *Kaomu* dan *Walaka* yang proses pendidikannya langsung ditangani oleh Sultan. Pendidikan Islam terus berkembang dan menyebar di wilayah-wilayah *Kadie* dan *Bharata* seiring dengan antusiasnya masyarakat untuk belajar agama di bidang Ilmu Fiqih, Bahasa Arab, Al Qur'an dan Hadits dan pembelajarannya dipusatkan di masjid Keraton Buton.

Pendidikan non-formal telah mampu meletakkan fondasi yang sangat kuat bagi masyarakat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan Agama Islam semakin kuat dengan keterlibatan para orang tua, untuk menanamkan lebih awal tentang nilai-nilai Islam yang bersentuhan dalam bidang Tahara (kesucian diri) sebagai implementasi pendidikan informal mereka. Semua ini merupakan rangkaian kurikulum pendidikan Islam di masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimudin

DAFTAR PUSTAKA

- Addin, Asnur, dkk. 2011. *Struktur Pemerintahan Kesultanan Buthuni*. Yayasan Fajar Al Buthuni – Bau – Bau
- Addin, Asnur, dkk. 2011. *Undang – Undang Martabat Tujuh dan sifat Dua Puluh*. Yayasan Fajar Al Buthuni – Bau – Bau.
- Addin, Asnur, dkk. 2011. *Nilai – nilai Agama Islam dalam Kehidupan Bernegara di Kesultanan Buthuuni*.
- Alhadza, Abdullah, 2009. *Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Sulawesi Tenggara*. Makala, Dalam Seminar Laporan Penelitian.

- Abdullah Muhammad , 2005. *Naskah Keagamaan dan Relevansinya dengan Proses Islamisasi Buton abad XIV sampai Abad XIX*. Makala. Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara IX. Baruga Keraton Buton, Bau – Bau 5 – 8 Agustus 2005.
- Al Qurtubi, 1967. *Al –jami’ Li Ahkam Al-Quran* Kairo: Dar Al-kitab Al –Arabi Li Al –Tiba’ah Wa Al Nasyr H. 211
- Abdul Gani, Ruslan, 1963. *Penggunaan Ilmu Sejarah*. Prapanca , Jakarta.
- Ahmad, 1994. *Tafsir Ilmu Pendidikan dalam Perpektif Islam*. Cet II, Bandung Rosda Karya. H. 147 -151.
- Abdullah Taufik, 1992. *Pemikiran Islam di Nusantara dalam Perpektif Sejarah*. Prisma, Jakarta, LP3ES. Nomor – 3 Tahun XX Maret hlm. 16 – 27.
- Ali Maulana, Muhammad, 1980. *Islamologi (Dinul Islam)*. Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeva:H.2.
- Ahmad D Marimba 1980. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung. Al –Maarif H.45 – 46
- Al – Asya’ari, 1952. *Kitab Al –Luma Firadd, Ala Ahlal – Ziqwa Al –Bida*. Beirut: Al Matba;ah Al Kasulikiyyah. H.94 -95.
- Rijanta, R, Dkk (Ed.) *Geografi Perdesaan, Sebuah Antologi, Program Studi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi, UGM, Yogyakarta*.
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Soetrisno, Loekman, *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Prospektif Volume 5 Nomor 4, Kajian Masalah-Masalah Nasional dan Internasional.
- Steward, H. Julian. 1950. *Area Research, Theory and Practice*. Social Science Research Council, Park Avenue, New York.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama, Bandung.
- Trijono, Lambang, *Pasca Revolusi Hijau di Pedesaan Jawa Timur*, Prisma 3 Maret Jakarta.
- Wahono, Prancis, 1994. *Dinamika Ekonomi Sosial Desa Sesudah 25 Tahun Revolusi Hijauh*, Prisma 3 Maret 1994, Jakarta.
- Yerimias T. Kaban, *Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur*, Prisma No. 10 - 1995, LP3ES, Jakarta